BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan berkeluarga terjadi melalui perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan undang-undang yang berlaku. Dari sini tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.

Hukum Islam mengatur hubungan suami istri, yaitu harus memperkuat isi perjanjian sejauh mungkin dan setiap usaha harus dilakukan agar kesatuan suami istri tetap utuh. Bila semua harapan cinta kasih antara mereka telah sirna, maka tiada upaya yang dapat dilakukan lagi untuk membuat pasangan yang malang itu kembali terikat bersama di samping saling membenci, saling tidak menyenangi dan saling tidak percaya. Dalam situasi yang demikian maka perceraian diperbolehkan.¹

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 65 disebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Kewenangan absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

¹Abul a’la Maududi, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 41

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Waris.
- c. Wasiat.
- d. Hibah.
- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syari'ah

Bahwa yang dimaksud dengan bidang “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, salah satunya mengenai masalah perceraian.²

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³. Putusnya Perkawinan yang diatur dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 karena:

- a. Kematian.
- b. Perceraian dan atas,

²Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2009), hlm. 13&15

³Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa , 2003), hlm. 42

c. Keputusan Pengadilan.⁴

Agama Islam memperbolehkan adanya perceraian, tetapi hal ini bukan berarti Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Islam tetap memandang perceraian sebagai suatu hal yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.⁵ Bagaimanapun juga perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt, sebagai mana yang dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمَاصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِنَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.^٦ (رواه ابن ماجه)

“telah menceritakan Katsîr bin Ubaid al-Himshy ia berkata, meriwayatkan kepada Muahmmad bin Khâlîd, dari ‘Ubaidillah bin Walîd al-Wasshâfî, dari Muhârib bin Ditsâr, dari Abdillâh bin Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: “perkara halal yang paling tidak disukai Allah adalah perceraian”. (H.R. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat dilalui suami istri apabila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan dilanjutkan. Sifat alternatif terakhir, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak maupun langkah-langkah teknik yang diajarkan oleh *Al-qur’ân* dan Hadis.⁷

Setiap perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dilengkapi alat bukti. Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam

⁴Pasal 113, *Kompilasi Hukum Islam*, tentang Putusnya Perkawinan, hlm. 5

⁵Sumiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 105

⁶Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mâjah*, (Lebanon: Dâr al Kutub, 1415 H), hlm. 633.

⁷Zaunudin Ali, *Hukum Pedata Islan di Indonesia*, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika: 2006), hlm. 73

hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari hukum acara, hukum acara Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 disebutkan: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Dalam pasal 164 HIR/ 284 R.Bg/ 1866 BW dinyatakan secara enumeratif alat bukti yang berlaku di Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama), adalah sebagai berikut.⁸

1. Bukti tertulis (surat).
2. Bukti dengan saksi-saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan-pengakuan.
5. Sumpah

Sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan sumpah yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan didepan sidang pengadilan dalam hal ini didepan majelis hakim. Sumpah yang diucapkan saksi dalam hal melakukan atau tidak melakukan sesuatu disebut sumpah *promissoir*, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji yang akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.⁹

⁸Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *op.cit.*, hlm. 107

⁹Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 62

Namun ini bukanlah alat bukti karenanya hakim tidak bisa menggunakannya untuk mengakhiri sengketa.

Kemudian sumpah sebagai alat bukti disebut sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*, adalah sumpah yang biasanya dilakukan oleh pihak yang berperkara, pengucapannya dilakukan setelah mereka memberi keterangan untuk meneguhkan suatu peristiwa atau hak yang berisi memberikan keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak benar demikian. Sumpah ini merupakan alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasar bagi hakim dalam mengakhiri sengketa.¹⁰

Di dalam hukum acara perdata para pihak yang bersengketa tidak dapat didengar sebagai saksi atas perkaranya tersebut. Namun dalam hal memperoleh keterangan dari pihak yang diteguhkan dibuka kemungkinan untuk mendengarkan para pihak dalam hal sumpah sebagai alat bukti.

Pada pokoknya Sumpah sebagai alat bukti dapat digolongkan menjadi tiga yaitu;

1. Sumpah pemutus atau *decisoir* (Pasal 156 HIR, Pasal 183 RBg, Pasal 1930-1939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Sumpah pemutus ialah sumpah yang dilakukan karena tidak ada alat bukti lain untuk memperkuat gugatan atau sanggahannya, maka salah satu pihak diharuskan mengangkat sumpah untuk membuktikan kebenaran dirinya.¹¹
2. Sumpah penaksir atau *aestimatoir* (Pasal 155 HIR, Pasal 182 Rbg, Pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
Sumpah *aestimatoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim jabatannya kepada penggugat untuk menentukan uang ganti kerugian. Sumpah *aestimatoir* diterapkan apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya yang

¹⁰Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991), hlm. 72

¹¹*Ibid*, hlm. 73

masih belum pasti, sehingga tidak ada cara lain yang dapat ditempuh kecuali dengan menaksir kerugian tersebut.¹²

3. Sumpah pelengkap atau *suppletoir* (Pasal 155 HIR, 182 RBg, 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sumpah *Suppletoir* ini biasa dikenal dengan sumpah tambahan atau sumpah pelengkap yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara, yang bertujuan untuk melengkapi pembuktian mengenai suatu peristiwa atau hak. Hal ini diperintahkan karena telah ada kebenaran suatu peristiwa atau hak, namun belum cukup terang berdasarkan bukti yang telah diajukan.¹³

Kebanyakan ahli hukum Islam (*jumhur fuqaha'*) menyamakan kesaksian *syaha>da>h* dengan *bayyina>h*. Apabila saksi disamakan dengan *bayyina>h* maka pembuktian di muka Peradilan Islam, termasuk di muka Peradilan Agama hanya mungkin dengan saksi saja.

Ada ahli hukum Islam yang mengartikan *bayyina>h* itu sebagai segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Pengertian ini berarti bahwa kesaksian hanya merupakan sebagian dari *bayyina>h*. Sehubungan dengan pembuktian, rasanya pengertian yang terakhir inilah yang tepat dipergunakan. Dalam mempergunakan saksi di muka sidang Pengadilan Agama hendaknya kita tahu membedakan apakah saksi sebagai syarat hukum ataukah sebagai alat pembuktian, sebab fungsi keduanya itu berbeda. Sebagai misal, 2 orang saksi adalah sebagai syarat hukum untuk sahnya perkawinan, namun untuk membuktikan adanya perkawinan tidak mesti dengan 2 orang saksi, melainkan dapat dengan cara lain, seperti : (1) dengan pengakuan suami istri dengan sumpahnya, (2) dengan adanya akta nikah, (3) dengan seorang

¹²*Ibid.* hlm. 75

¹³*Ibid.* hlm. 77

saksi ditambah sumpah dari salah seorang suami istri dimaksudkan, (4) dan sebagainya. Hal-hal di atas ini juga diakui sendiri oleh para ahli hukum.¹⁴

Imam Abu Hanifah, tidak dapat menerima kesaksian satu orang saksi walaupun ditambah dengan sumpah penggugat, karena ia mendasarkan pendapatnya tersebut pada firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi;¹⁵

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil”.

Karena menurutnya bahwa seorang saksi ditambah sumpah penggugat adalah merupakan menambah nash, sedangkan menambah nash adalah nasakh. Dan nasakh terhadap *Al-qur'ān* itu tidak dapat diterima kecuali dengan hadist mutawatir atau hadist masyhur, akan tetapi dalam masalah ini kedua hadist tersebut sudah tidak ada.¹⁶

Sayyid Sabiq menambahkan bahwa kesaksian satu orang laki-laki yang adil itu dapat diterima akan tetapi hanya dalam masalah ibadah seperti adzan, shalat, dan puasa.¹⁷

¹⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 152-155

¹⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, hlm. 70

¹⁶Wahbah Al-Zuhairi, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuh*, Juz VI, Bairut: Daar Al-Fikr, hlm. 527

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Daar Al-Fikr, hlm. 341

Sebagaimana menurut Imam Abi Bakr Ahmad Ar-Razi al- Jashash, dalam kitabnya *Ahkam Al-qur'ān* berkata: “Kita tahu bahwa satu saksi itu tidak diterima kesaksiannya karena tidak sesuai dengan ayat *ممن ترضون من الشهداء* (yang terdapat dalam surat al-Baqarah (2):282) dan sumpah penggugat itu tidak boleh menempati tempatnya saksi. Dan juga tidak boleh berdasarkan atas kerelaan terhadap apa yang dituduhkan kepada dirinya; menghukumi hanya dengan satu saksi dan sumpah, itu termasuk menyalahi ayat *Al-qur'ān* dan menghilangkan tujuan dari perintah persaksian yang meliputi kehati-hatian dan kepercayaan atau berpegang teguh kepada apa yang di terangkan Allah Swt dalam ayat tersebut”.¹⁸

Al-Jashash membedakan antara sumpah dan *bayyina>h*. Menurutnya sumpah itu tidak boleh dengan *bayyina>h*, karena kata *al- bayyina>h* merupakan isim dan jenis (bersifat umum), maka dia juga mencakup kata apa saja yang ada di bawahnya. *bayyina>h* itu hanya diwajibkan bagi penggugat, dan dengan demikian maka dia tidak dikenakan sumpah dan juga karena *bayyina>h* itu merupakan kata yang bersifat global yang kadang punya makna berbeda-beda. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa dua orang saksi laki-laki atau satu orang saksi laki-laki dan dua orang perempuan itulah yang dikehendaki, dan tidak diperbolehkan kurang dari itu. Dalam hukum pembuktian, status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum ada kalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus syarat pembuktian.

Di dalam hukum acara perdata dikenal asas pembuktian yakni bahwa penggugat dibebani untuk membuktikan gugatannya. Hal ini tertera dalam pasal 163 HIR yang berbunyi:

¹⁸Imam Abi Bakr Ahmad Ar-Razi Al- Jashash, *Ahkam Al-Qur'an*, Juz I., Beirut: Daar Al-Fikr, hlm. 802

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, orang yang menuntutlah yang harus dibebani pembuktian. Sumber yang akan digunakan hakim dalam memutus perkara disebut alat bukti. Alat-alat bukti dalam proses pembuktian bersumber pada Pasal 164 HIR. Alat bukti yang dimaksud adalah: bukti dengan surat, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.”¹⁹

Tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri, diantaranya.²⁰

1. Bukti mengikat dan menentukan (*bindend & beslissend*) meskipun hanya meskipun hanya satu alat bukti telah cukup memutus perkara tanpa membutuhkan alat bukti lain, hakim terikat dan tidak dapat memutus lain dari apa yang telah terbukti, karena tidak dapat dilimpuhkan oleh bukti lawan, contohnya sumpah *decisoir*, sumpah pihak dan pengakuan.
2. Bukti sempurna (*volleding*) meskipun hanya satu bukti sudah cukup bagi hakim untuk memutuskan, hakim terikat oleh bukti itu kecuali dapat dibuktikan sebaliknya atau dikumpulkan oleh bukti lawan, misalnya akta autentik.
3. Bukti bebas yang diserahkan kepada hakim untuk menilai sesuai pertimbangan yang logis hakim tidak terikat dan dapat menerima atau mengesampingkannya, misalnya bukti saksi, saksi ahli, dan pengakuan diluar sidang.
4. Bukti permulaan, yaitu alat bukti sah yang belum mencukupi syarat formal sehingga harus ditambah dengan bukti lain, hakim bebas dan tidak terikat, misalnya alat bukti saksi yang hanya seorang atau akta dibawah tangan yang diingkari tandatangannya oleh pihak yang bersangkutan.
5. Bukti bukan bukti, yang meskipun tampaknya dapat memberikan keterangan yang mendukung peristiwa tetapi tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah, misalnya saksi yang tidak disumpah atau belum cukup umur, foto-foto, rekaman dan lain-lain.

¹⁹Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 161

²⁰Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 57

Mengingat bahwa sumpah *suppletoir* adalah alat bukti terakhir dalam pasal 163 HIR yang digunakan karena bukti yang ada baru bernilai sebagai bukti permulaan dan para pihak tidak mampu lagi menambah alat bukti yang ada dengan alat bukti lainnya. Sumpah diterapkan atau digunakan apabila alat-alat bukti yang ada di persidangan kebenaran gugatan atau kebenaran jawaban atas gugatan tidak cukup terang, tetapi juga ada kebenarannya, sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan. Pengangkatan Sumpah sebagai alat bukti merupakan hal yang menyangkut orang yang bersumpah dengan menyebut nama Tuhan (kenyakinannya), serta ketakutan akan azab Tuhan apabila ia berbohong. Sumpah adalah suatu pernyataan khidmat yang diberikan dan diucapkan pada waktu memberi janji dan keterangan dengan mengikat akan sifat Yang Maha Kuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehNya.²¹ Lafal sumpah biasanya berbunyi :

“Demi Allah (Islam) bahwa apa yang saya ucapkan didepan hakim adalah sejujur-jujurnya, apabila saya berbohong, maka saya akan menerima azab, laknat siksa, kutuk dari Tuhan untuk kehidupan saya. Apabila saya benar maka azab, laknat kutukan Tuhan akan menimpa diri Penggugat”

Pada kenyataannya Pengadilan Agama dalam putusan Nomor 78/Pdt.G/2012/PA.Rtu hanya menghadirkan satu orang saksi ditambah dengan sumpah *suppletoir*. Sumpah masih merupakan ide belaka yang tidak dapat memuaskan dalam pembuktian dibanding dengan alat-alat bukti lainnya yakni surat, saksi, persangkaan dan pengakuan yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Penggunaan sumpah walaupun merupakan alat bukti namun tidak dapat memuaskan pembuktian karena pihak yang mengangkat sumpahlah yang akan memenangkan perkara.

²¹Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika Offset , Jakarta, 2008, hlm. 45.

Menurut penulis berkesimpulan sementara bahwasanya kedudukan sumpah sebagai alat bukti tambahan agar dapat memutus perkara perceraian merupakan jalan terakhir agar perkawinan dapat diputuskan seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Peradilan Agama dan juga sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta-fakta di atas, menjadi alasan penulis untuk mengetahui secara jelas terhadap pembuktian serta bagaimana dengan alat-alat bukti yang ada di persidangan hingga sampai pada sumpah *suppletoir* untuk memutus perkara. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Kedudukan Sumpah Sebagai Alat Bukti Tambahan Dalam Putusan Perceraian Khul’i Di Pengadilan Agama” (Studi Terhadap Pendapat Hakim Di Pengadilan Agama Rantau)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau tentang kedudukan sumpah sebagai alat bukti tambahan dalam putusan perceraian Khul’i?
2. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memberikan pendapatnya?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis bertujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Rantau tentang kedudukan sumpah sebagai alat bukti tambahan dalam putusan perceraian Khul’i.

2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim didalam memberikan pendapatnya.

D. Definisi Operasional

1. Alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan, disini yang penulis maksudkan adalah kedudukan alat bukti seorang saksi ditambah dengan sumpah.
2. Hakim adalah orang yang mengadili perkara di Pengadilan atau Mahkamah Agung.²² yang penulis maksudkan disini adalah beberapa Hakim Pengadilan Agama Rantau.
3. Khul'i adalah perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang iwad

E. Signifikansi Penulisan

Dari hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Acara Perdata.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

²²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), Ed. 2., Cet. 3., 1994, hlm.151

4. Memperkaya khazanah keputakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penulisan ini.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penulisan yang telah ada, berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul:

“Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Martapura”, oleh Hj. Kiki Mardiana (NIM : 9411118544) penulisan ini mengkhususkan pada kedudukan kesaksian non muslim di Pengadilan Agama Martapura. Bahwasanya dalam menyelesaikan perkara perceraian pada prinsipnya tidak dapat menerima saksi non muslim sebagai alat bukti atau dalam kesaksiannya tidak begitu kuat, akan tetapi tidak secara mutlak, karena secara kasuistik dapat menerima kesaksian saksi non muslim sebagai alat bukti. Yang berdasarkan atas kewenangan dan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelin hakim, dan sebagaimana sesuai dengan tugas poko dan fungsi seorang haki. Yang terdapat dalam pasal 19 Undang-Undang Ripublik Indonesia Nomor. 48 tahun 2009 kekuasaan kehakiman.

“Alat Bukti Saksi Keluarga Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Khul'i (Studi Terhadap Pendapat Beberapa Hakim Di Pengadilan Agama Marabahan). Oleh Ahmad Mujahid (2015). IAIN Antasari Banjarmasin. penulisan ini mengkhususkan pada Alat Bukti Saksi Keluarga. Para

hakim sepakat bahwa boleh menggunakan saksi keluarga tetapi hanya alasan-alasan atau dasar hukumnya saja yang berbeda-beda, bahwasanya boleh menggunakan saksi keluarga selama sarat formil dan materilnya terpenuhi. Mengenai sarat formil terbenturnya pada Pasal 172 RBg dan Pasal 145 HIR, akan tetapi dalam Pasal 172 RBg dan 145 HIR itu sifatnya umum itu berbeda dengan Hukum Islam, adapun aturan yang mengatur secara khusus tentang perceraian khul'i memang tidak ada. Dengan demikian hakim boleh menafsirkan terhadap teks Undang-undang atau berijtihad untuk memenuhi kekosongan hukum.

skripsi tersebut diatas penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penulisan yang ingin dilakukan penulis berbeda dengan penulisan yang ada, dimana penulis akan menitik beratkan permasalahan pada bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Rantau terhadap “kedudukan sumpah sebagai alat bukti tambahan dalam memutus perkara perceraian khul'i di pengadilan agama” (studi terhadap beberapa pendapat hakim di pengadilan agama Rantau). Maka dari itu penulis berharap penulisan ini menjadi langkah awal bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada masalah yang berbeda. Dan menjadi informasi bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penyempurnaan dikemudian hari terhadap penulisan “kedudukan sumpah sebagai alat bukti tambahan dalam memutus perkara perceraian khul'i di pengadilan agama” (studi terhadap beberapa pendapat hakim di pengadilan agama Rantau) yang penulis buat ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan penulisan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dasar penulisan, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan, rumusan masalah yang berisi rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penulisan, tujuan penulisan merupakan arah yang akan dicapai dari penulisan, defnisi operasional, signifikansi penulisan merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penulisan, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penulisan dan sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis daripada bab IV yang terdiri dari pengertian dan sebab-sebab perceraian, pembuktian dalam perceraian, kedudukan alat bukti seorang saksi ditambah sumpah dalam perkara perceraian, kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara perdata dan sumber hukum yang digunakan.

Bab III merupakan Metode penulisan, yang terdiri dari jenis dan sifat penulisan, subjek dan objek penulisan, data dan sumber data, tehnik pengolahan dan analisis data serta tahap penulisan.

Bab IV merupakan laporan hasil penulisan dan analisis yang terdiri dari identitas responden, pendapat hakim dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.